

ARTIKEL

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA  
DI KABUPATEN PANGANDARAN**

---

Oleh:

**Milna Nuraida  
NPM: 208010049**



**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PASUNDAN  
BANDUNG 2023**

## ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok, yaitu Implementasi Kebijakan Pariwisata Di Kabupaten Pangandaran. Hal ini diasumsikan masih ada beberapa permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pangandaran. Pendekatan dalam penelitian ini tentang implementasi kebijakan dilihat dari konteks kebijakan publik dan administrasi publik sebagai teori induknya untuk mengembangkan khasanah ilmu administrasi publik. Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Kebijakan Pariwisata Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan secara kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan Pariwisata di Obyek Wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran sudah bagus. Meskipun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan untuk mendukung implementasi kebijakan Pengembangan Pariwisata di Obyek Wisata dengan baik. Selanjutnya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Antara pola hubungan antar unit kerja dan norma-norma yang berlaku harus lebih ditingkatkan dalam pelaksanaannya belum menyentuh seluruh aspek pencapaian keberhasilan dan harus ditingkatkan. Hasil penelitian ini, peneliti menyarankan kepada peneliti lainnya yang ingin mengadakan penelitian dengan topik yang sama agar mengkombinasikan dengan teori lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Selain itu diharapkan peneliti lainnya dapat melihat masalah dengan tidak dari satu sisi, namun dapat dilihat dari berbagai sisi. Penelitian ini masih banyak faktor yang belum diteliti secara detail sehingga memungkinkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan faktor atau variabel yang diganti dengan faktor lainnya oleh peneliti lainnya.

*Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengembangan Pariwisata.*

## ABSTRACT

This research is based on the main problem, namely the Implementation of Tourism Policy in Pangandaran Regency. It is assumed that there are still some problems in the Implementation of Tourism Development Policy of Pangandaran Regency. The approach in this study is about policy implementation seen from the context of public policy and public administration as the parent theory to develop the treasures of public administration science. The purpose of the study was to analyze the Implementation of Tourism Policy of Pangandaran Regency. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. The results showed that Tourism Development in Tourism Objects at the Pangandaran Regency Tourism Office was good. Although there are several things that must be improved to support the implementation of Tourism Development policies in Tourism Objects properly. Furthermore, this study can be concluded that between the pattern of relationships between work units and applicable norms must be further improved in its implementation, it has not touched all aspects of achieving success and must be improved. The results of this study, the researcher suggested to other researchers who want to conduct research on the same topic to combine with other theories that were not used in this study. In addition, it is hoped that other researchers can see the problem not from one side, but can be seen from various sides. This research still has many factors that have not been studied in detail so that it is possible to conduct further research

with factors or variables that are replaced with other factors by other researchers.

Keywords: Policy Implementation, Tourism Development.

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pariwisata sebagaimana kedudukannya sekarang ini, merupakan salah satu sektor unggulan (*leading sector*) dalam perekonomian Nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Jika ditinjau dari aspek social ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, peningkatan penerimaan devisa meningkatkan kewirausahaan Nasional dan turut mendorong pembangunan di daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menggariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam kebudayaan bangsa Indonesia.

Menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara. (Lia Muliawaty, 2019)

Pembagian kewenangan antara daerah dan pusat terlihat jelas ketika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan. Dalam undang-undang pemerintahan daerah ditegaskan mana yang menjadi tugas dan kewenangan pusat dan mana yang merupakan tugas dan kewenangan daerah. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Strategi pengembangan dan penataan kawasan wisata Kabupaten Pangandaran yang belum efektif. Strategi dibangun untuk menghasilkan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti yang telah terjadi di kawasan pantai pangandaran sebagai destinasi paling favorit wisatawan, para pedagang kaki lima yang kini ada di zona inti telah dipindahkan ke bagian belakang, namun karena pemindahan pedagang tidak mengikuti jalur lintas wisatawan, maka interaksi para pedagang dengan wisatawan sulit terjadi, lama kelamaan pedagang kembali masuk ke zona inti. Akhirnya, relokasi pedagang kaki lima dan tempat parkir yang telah menghabiskan jutaan rupiah disia-siakan begitu saja dan menjadi tidak terawat.

Pengembangan kegiatan pariwisata masih berfokus pada pengembangan aspek destinasi alam. Belum terlihat upaya menciptakan objek pariwisata baru yang bersifat non-fisik, seperti mengembangkan potensi kebudayaan yang dimiliki, semisal upacara adat atau prosesi kultural unik lainnya.

Potensi wisata di Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu daerah destinasi wisata yang mempunyai objek wisata yang menarik untuk dikembangkan, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata seni dan budaya atau wisata lainnya belum seluruhnya dikelola secara profesional, maka peranan pemerintah sebagai fasilitator sangatlah strategis dalam mewujudkan upaya-upaya ke arah pengembangan pariwisata tersebut, melalui empat hal utama yaitu; perencanaan (*planning*) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (*development*) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (*policy*) pariwisata, serta pembuatan dan penegakan peraturan (*regulation*).

Kritik bahwa pembangunan hanya menjadi kepentingan pihak tertentu, menyadarkan pemerintah perlunya *collaborative governance* yang lebih beretika. Terlebih bahwa urgensi sektor pariwisata sebagai locus penelitian ini didasari pertimbangan sebagai berikut: Pertama, dilematis otonomi daerah dimana pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya, sehingga menjadikan sektor pariwisata sebagai *leading sector* dalam capaian peningkatan pendapatan asli daerah (PAD); Kedua, adanya perubahan perspektif pengelolaan pada sektor pariwisata yang mengalami pergeseran mulai dari *high-volume production of standart commodities menjadi high-volume production of unque commodities*. Artinya model pengelolaan pariwisata yang massal dengan banyak mengundang dan mengikutsertakan investor swasta bahkan asing, perlindungan yang berlebihan terhadap sektor swasta, banyak mengeluarkan izin pengelolaan yang bersifat eksklusif, menjadi sangat jauh dari jangkauan masyarakat lokal, bahkan berdampak pada sosial, ekonomi serta lingkungan yang merugikan terutama bagi komunitas lokal.

Munculnya permasalahan tersebut tentunya akan mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di wilayah Pangandaran. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "**Implementasi Pariwisata di Kabupaten Pangandaran (Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran.**

## II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKAN BERFIKIR DAN PROPOSISI

### **Kebijakan Publik**

Gerak kehidupan masyarakat yang ada dalam wilayah hukum negara sering timbul permasalahan sosial. Pemerintah yang dipilih dan diamanatkan oleh masyarakat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kebijakan publik yang dilahirkan oleh pemerintah diharapkan jadi penawar bagi permasalahan yang ada. Memahami bagaimana kebijakan publik sebagai landasan dari berbagai solusi dari persoalan yang terjadi. Kita harus terlebih dahulu mengetahui apa dan seperti apa kebijakan publik dalam mengatasi persoalan yang muncul.

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak. Umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah.

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

### **Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan**

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (2005:101) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Dimensi-dimensi tersebut diantaranya:

1. Kondisi lingkungan  
Lingkungan sangat mempengaruhi pada implementasi kebijakan. Lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.
2. Hubungan antar organisasi  
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
3. Sumber daya organisasi  
Implementasi program Implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.  
Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. ( Subarsono, 2005:101).

Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli tersebut terdapat faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang diterapkan. Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan. Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kebijakan dapat melakukan upaya untuk mendorong



Pemerintahan Daerah dalam program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijaksanaan nasional khususnya untuk membantu pembiayaannya.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **Metode Penelitian**

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dimana menjelaskan suatu masalah dengan batasan terperinci, pengambilan data yang benar dan akurat serta menyertakan berbagai sumber informasi yang terpercaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian Studi Kasus.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), yaitu peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi Saebani (2008:122). Peneliti menggunakan metode kualitatif agar dapat mengetahui cara pandang objek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik.

#### **Penentuan Informan**

Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah pejabat/aparat Kabupaten Pangandaran. Keseluruhan informan ini adalah Pegawai pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata serta Informan tersebut yaitu:

1. Kepala/Sekretaris Disporapar Kabupaten Pangandaran (1 orang).
2. Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Pangandaran (1 orang).
3. Pengelola OW Air Panas Cipari (1 orang).

4. Pengunjung/Wisatawan obyek wisata (1 orang).

## IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembahasan

#### **Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran**

Pengembangan pariwisata di suatu instansi pemerintahan tentunya sangat memerlukan sistem dan mekanisme yang baik. Untuk menghasilkan pengelolaan yang baik ini harus ada sistem kerja yang baik. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana dan konsistensi. Tidak terkecuali di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pangandaran dalam pengembangan pariwisata sangat diperlukan. Berdasarkan hal tersebut maka pembahasan dengan judul penelitian **“Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran”** adalah sebagai berikut:

##### 1. Dimensi Kondisi Lingkungan

Keadaan kondisi lingkungan di Objek Wisata Air Panas Cipari sudah mendukung dalam kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pangandaran. Hal ini dibuktikan dari pendapat Informan bahwa kondisi sosial, kultural dan penerima program dalam pengembangan pariwisata sudah baik dan cenderung memberikan kondisi lingkungan yang kondusif Objek Wisata Air Panas Cipari.

##### 2. Dimensi Hubungan antar Organisasi

Dari hasil wawancara bersama Informan bisa disimpulkan bahwa dimensi hubungan antar organisasi untuk Implementasi Kebijakan PMK 248 Tahun 2010 tentang Pengembangan pariwisata pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pangandaran sudah berjalan sesuai ketentuan. Hubungan kerjasama Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pangandaran dengan instansi lainnya terkait dalam pengembangan pariwisata sudah berjalan baik baik dengan instansi lainnya. Meskipun sudah ada pola kerjasama terkait pengembangan

pariwisata tapi dalam tahap pelaksanaan masih lemah dalam segi pengawasan terutama pengawasan internal. Mengatasi hal ini Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pangandaran melakukan komunikasi secara intens dalam melakukan kerjasama yang lebih baik dalam pengembangan pariwisata ini.

### 3. Dimensi Sumber Daya

Dari hasil wawancara bersama Informan bisa disimpulkan bahwa dimensi sumber daya untuk pengembangan pariwisata pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pangandaran, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pangandaran sudah memiliki kuantitas SDM yang cukup secara jumlah dengan pengalaman yang cukup lama sehingga dalam pengembangan pariwisata sudah tidak diragukan lagi. Dukungan sarana dan prasarana sudah ada dan cukup membantu bagi pengelola kegiatan dan keuangan untuk beraktifitas, namun masih belum ditingkatkan secara maksimal untuk mendukung dalam pengembangan pariwisata, mengingat kebutuhan pengunjung objek wisata terhadap fasilitas yang terdapat di pengelolaan Objek Wisata Air Panas Cipari. Selain itu kualitas sumber daya manusia masih perlu peningkatan kapasitas aparatur dan pengelola objek wisata supaya kebijakan pengembangan pariwisata dapat berjalan secara maksimal.

### 4. Dimensi Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Dari dimensi ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik dan kemampuan agen pelaksana dalam implementasi kebijakan khususnya dalam pengembangan pariwisata di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pangandaran sudah baik dan cukup mumpuni. Meskipun ada beberapa hal yang harus perlu ditingkatkan untuk mendukung implementasi kebijakan pengembangan pariwisata supaya lebih baik lagi.

## **Strategi Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran**

### **1. Kondisi Lingkungan**

Faktor-faktor yang berasal dari lingkungan internal potensi potensi Kawasan Darma dilihat dari icon Kuliner dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kekuatan
  - Proses pembuatan kebijakan
  - Kecukupan Infrastruktur
- (2) Kelemahan
  - Struktur Kekuatan Lokal

Merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Strategi yang diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*), sehingga kekuatan yang dimiliki dapat dimaksimalkan melalui pada proses pembuatan dan pemanfaatan infrastruktur.

### **2. Hubungan antar Organisasi**

Faktor-faktor yang berasal dari lingkungan Internal dan eksternal dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kekuatan
  - Kejelasan dan Konsistensi Tujuan Program
  - Alokasi Fungsi yang tepat
2. Kelemahan
  - Kualitas Komunikasi Antar Organisasi
- (2) Peluang
  - Efektivitas perencanaan penganggaran dan prosedur pelaksanaan
- (3) Ancaman
  - Struktur Kekuatan Lokal

Situasi yang tidak menguntungkan organisasi. Strategi yang dilakukan dapat berupa defensif. Artinya hubungan antar organisasi belum dapat berjalan

dengan baik terkait dengan lintas sektor sehingga harus dilakukan kembali persamaan persepsi pentingnya pengembangan pariwisata.

### **3. Sumber Daya Organisasi**

Faktor-faktor yang berasal dari lingkungan Internal dan eksternal dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kekuatan
  - Sumber Daya Manusia
  - Ketersediaan sumber daya anggaran
2. Kelemahan
  - Dukungan dari birokrasi nasional
3. Peluang
  - Kecukupan anggaran
4. Ancaman
  - Dukungan Pemerintah daerah

Merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Strategi yang diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy).

### **4. Karakteristik Agen Pelaksana**

Faktor-faktor yang berasal dari lingkungan Internal dan eksternal dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Kekuatan
  - Keterampilan teknis pengelolaan dan kebijakan staff
  - Efektivitas komunikasi internal
- b. Kelemahan
  - Hubungan lembaga dengan penerima program Peluang
  - Lokasi lembaga dalam sistem administrasi
- c. Peluang
  - Kualitas Kepemimpinan lembaga
  - Dukungan dan sumber daya lembaga

- Komitmen staff
- d. Ancaman
- Hubungan dengan lembaga / instansi yang mengatur

Kapasitas untuk koordinasi, kontrol dan integrasi keputusan.

Merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Strategi yang diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

#### 1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran

Kesimpulan umum penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Obyek Wisata Air Panas Cipari di Kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pangandaran sudah baik, akan tetapi masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi secara bersama-sama. Hal ini bisa dilihat dari penemuan yang didapat oleh peneliti melalui observasi dan wawancara. informanmentaranya:

#### 2. Strategi mplementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran

##### Kondisi Lingkungan

Strategi yang diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*), sehingga kekuatan yang dimiliki dapat dimaksimalkan melalui pada proses pembuatan dan pemanfaatan infrastruktur.

##### Hubungan antar Organisasi

Strategi yang dilakukan dapat berupa defensif. Artinya hubungan antar organisasi belum dapat berjalan dengan baik terkait dengan lintas sektor sehingga harus dilakukan kembali persamaan persepsi pentingnya pengembangan pariwisata.

##### Sumber Daya Organisasi

Strategi yang diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).

##### Karakteristik Agen Pelaksana

Strategi yang diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).



## **Saran**

### **1. Saran Akademis**

Hasil penelitian ini, peneliti menyarankan kepada peneliti lainnya yang ingin mengadakan penelitian dengan topik yang sama agar mengkombinasikan dengan teori lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Selain itu diharapkan peneliti lainnya dapat melihat masalah dengan tidak dari satu sisi, namun dapat dilihat dari berbagai sisi.

Penelitian ini masih banyak faktor yang belum diteliti secara detail sehingga memungkinkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan faktor atau variabel yang diganti dengan faktor lainnya oleh peneliti lainnya.

### **2. Saran Praktis**

- 1) Manfaatkan SDM aparatur dalam Pengembangan Pariwisata melalui pengkaderan yang berjenjang dan peningkatan kapasitas SDM seperti pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pangandaran dan Objek Wisata Air Panas Cipari dalam Pengembangan Pariwisata di Obyek Wisata Air Panas Cipari ini.
- 2) Memanfaatkan anggaran yang ada untuk menangani masalah yang ada, terutama sesuai dengan anggaran yang tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan untuk mencegah terjadi penyalahgunaan wewenang sehingga mengarah kepada penguatan fungsi pengawasan internal pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pangandaran.
- 3) Meningkatkan koordinasi antara Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pangandaran dan pengelola Objek Wisata Air Panas Cipari dengan sebaik mungkin melalui rapat rutin bulanan, laporan kinerja, laporan pengembangan pariwisata Objek Wisata Air Panas Cipari.
- 4) Mengintensifkan pelaksanaan pengawasan pengembangan pariwisata yang sangat baik melalui pembentukan Sistem Pengawasan Internal pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pangandaran terhadap pihak pengelola Air Panas Cipari Kabupaten Pangandaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Rasid, Harun. 1994. *Analisis Jalur (Path Analysis) Sebagai Sarana Statistika Dalam Analisis Kausal*. Bandung: LP3ES Fakultas Ekonomi UNPAD.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. *Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Echols, John M dan Sadily, Hasan. 1992. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Handyaningrat, Soewarno. 1995. *Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Harits, Benyamin. 2002. *Paradigma Baru Dimensi-dimensi Prima Administrator Publik*. Bandung: Insani Press.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Profesionalisme dan Akuntabilitas Birokrasi Publik Berbasis Kinerja dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Henry, Nicholas. 1988. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan*. Terjemahan: Luciana D. Lontoh. Jakarta: Rajawali.
- Iskandar. 2001. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Gramedia.
- Islamy, M. Irfan. 1994. *Prinsip-prinsip Perumumsan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara Jakarta.
- Kasim, M. 1994. *Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Kristiadi, J.R. 1994. *Administrasi Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Lia Muliawaty. (2019). STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA MENUJU KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN CIREBON. *DECISION: Jurnal Administrasi Publik*, 82-101.
- Mangkunegara, Anwar. 2004. *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Martin, Mike W. dan Schinzing, Roland. 1994. *Etika Rekayasa* *Ea* Terjemahan: Prihminto Widodo. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pamungkas, Sri Bintang. 1996. *Pokok-pokok Pikiran tentang Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Daulat Rakyat.

- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Perubahan dan Inovasi Kebijakan dan Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Rasyid, M. Ryaas. 1997. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*. Jakarta: IIP.
- Silalahi. 1989. *Sistem Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sobandi, Baban. 2002. *Etika Kebijakan Publik*. Jakarta: Mutiara Ilmu.
- Subarsono, AG.2011. Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiono. 1992. *Metoda Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suradinata, Ernmaya. 1993. *Kebijakan, Keputusan dan Kebijaksanaan*. Bandung: Mandar Maju.
- Wahab, Abdul Solihin. 1997. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2005. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: MedPres.

#### **Dokumen**

- Yagus Triana H.S. 2017. “*Strategi Implementasi Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran*” Desertasi, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan syarief.
- Januar Dwi Baskoro. 2016. “*Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur*” Tesis, Mahasiswa Pasca Sarjana Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Maksimilianu Maris Jupir. 2016 “*Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal*”. Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

